ANALISIS DAMPAK PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

JUMANIA SEPTARIANI, S.E., M.Si., Ak., CA.

STIE Rahmaniyah Sekayu Email: jseptariani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang dampak penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pelaporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki dampak dalam penyajian laporan keuangan BPKAD. Salah satunya perubahan komponen laporan keuangan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci menjadi lebih rinci sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh pengguna, lebih akuntabel serta lebih relevan. meskipun masih ada kendala dalam mengkonversikan komponen tersebut sehingga terjadi keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan. BPKAD sebaiknya mengadakan pelatihan tentang pengelolaan SIMDA Keuangan bagi pegawai dan operator SIMDA setiap OPD serta menyeleksi pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya agar lebih mempermudah penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016.

Kata kunci : SAP, Aset Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Basis Akrual

LATAR BELAKANG

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undangundang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan umum pelaporan keuangan dengan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan peran informatif, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pengguna. Dengan laporan keuangan berbasis akrual, pengguna dapat melakukan penilaian atas kinerja keuangan, posisi keuangan, aliran arus kas suatu entitas, kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi, hukum dan perjanjian kontrak. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat membantu pengguna internal dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam menjalankan suatu usaha. Untuk mewujudkannya diperlukan aparat pemerintah yang mampu menerapkan dalam praktiknya. Namun perubahan sebuah sistem akuntansi bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Laporan BPKAD pada tahun 2014 masih menggunakan basis kas menuju akrual, dan mulai tahun 2015 BPKAD mulai menerapkan basis akrual sampai tahun 2017 basis akrual telah di terapkan sepenuhnya.

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual berdampak pada perubahan komponen laporan keuangan yang sebelumnya tidak disajikan dalam laporan keuangan setelah berbasis akrual harus disajikan secara lebih rinci. Perubahan komponen keuangan tersebut menyebabkan staf BPKAD kesulitan dalam menkonversikan komponen laporan keuangan dari basis kas menuju akrual menjadi akrual sepenuhnya. Salah satunya dalam hal pendapatan dan biaya yang sebelumnya hanya disajikan dalam laporan realisasi anggaran tetapi setelah berbasis akrual akun pendapatan disajikan dalam laporan operasional dan akun biaya menjadi akun beban didalam laporan operasional.

Kesulitan mengkonversikan komponen laporan keuangan berbasis kas menuju akrual menjadi akrual harus juga mengakibatkan sering terjadinya kesalahan dan keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada bagian Akuntansi BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.

KAJIAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Basis Standar Akuntansi Pemerintahan

Darise (2008:38), Basis Akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan laporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas dan basis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

Halim (2012:54), basis kas menetapkan bahwa pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Halim (2012:54), basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

PSAP 01 (2010:6), laporan keuangan pemerintah daerah itu adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas.

Komponen Laporan Keuangan

PSAP (2010:7), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan menngenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan infomasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Untuk lebih jelas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berdasarkan SAP kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah SAP Berbasis Kas Menuju
Akrual dan SAP Berbasis Akrual

	Aktual uali SAI Delbasis Aktual				
No	Keterangan	SAP Berbasis Kas Menuju Akrual	SAP Berbasis Akrual		
1	Komponen laporan keuangan	Laporan keuangan pokok: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Arus Kas 4. Catatan atas Laporan yang Bersifat Optional: 1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK) 2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Laporan Anggaran: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Salso Anggaran Lebih (SAL) Laporan Finansial: 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. Catatan atas Laporan Keuangan		
2	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang di atur dalam perundangan	Tetap diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang di atur dalam perundangan.		

No	Keterangan	SAP Berbasis Kas Menuju Akrual	SAP Berbasis Akrual
3	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	Tidak ada laporan	Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 1. Saldo Anggaran Lebih awal 2. Saldo Anggaran Lebih 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 4. Anggaran Tahun Berjalan 5. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lainlain. 6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
4	Neraca	Akun Ekuitas disebut sebagai Ekuitas Dana yang terbagi: 1. Ekuitas Dana Lancar 2. Ekuitas Dana Investasi 3. Ekuitas Dana Cadangan	Tidak lagi disebut Ekuitas Dana, hanya Ekuitas saja yaitu kekayaan pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah pada tanggal Laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari Saldo Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas
5	Laporan Arus Kas	 Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Arus masuk dan keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. 	Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Arus masuk dan keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran
6	Laporan Kinerja Keuangan / Laporan Opearsional	 Bersifat Opsional. Disusun oleh Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Berbasis Akrual 	Merupakan Laporan Keuangan Pokok.
7	Laporan Perubahan Ekuitas	Bersifat opsional	Merupakan Laporan Keuangan Pokok
8	Catatan Atas Laporan Keuangan	Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan	Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait

No	Keterangan	SAP Berbasis Kas Menuju Akrual	SAP Berbasis Akrual
		Keuangan 2. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinciatau analisis atas nilai suatu pos yan di sajikan dalamLRA, Neraca, dan LAK.	dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinciatau analisis atas nilai suatu pos yan di sajikan dalamLRA, Neraca, dan LAK.

Sumber : Ratmono (2015:109)

Indikator Penerapan Akuntansi Basis Akrual

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penerapan laporan keuangan berbasis akrual terdapat 5 (lima) karakteristrik kualitatif laporan keuangan sebagai indikator yang diperlukan sebagai prasyarat tercapainya kualitas laporan keuangan yang dikehendaki yaitu :

1. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan sehingga semakin membuat informasi tidak relevan.

2. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

3. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikam setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, baik secara internal maupun eksternal.

5. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oelh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I:9), Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari 3 (tiga) asumsi yaitu :

1. Asumsi kemandirian entitas

Kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

2. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang di asumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin Lk. VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2012:137), dilihat dari jenis data yang digunakan dalam suatu penelitian adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil obsevasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, biasanya seudah dalam publikasi-publikasi.

Adapun jenis data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data yang diperoleh melalui wawanacara maupun dokumentasi, berupa Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:132), data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Menelaah teori-teori yang bersumber dan buku-buku teks, teori-teori dan literatur, jurnal dan sebagainya untuk mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian.

b. Observasi

Penelitian melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian dalam mengumpulkan data-data sebagai penunjang penelitian.

c. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan judul penelitian.

d. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:131), teknik analisis data adalah proses mencari dan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pemahaman tentang fenomena dalam latar belakang.

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dalam Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan hasil dari pertanggungjawaban keuangan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu tahun anggaran yang disajikan secara lengkap sebagai salah satu bentuk transparansi dan akutabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BPKAD sebelumnya telah menerapkan akuntansi berbasis akrual walaupun belum dilakukan sepenuhnya. BPKAD telah menerapkan basis kas menuju akrual karena kebijakan akuntansi terkait dengan akumulasi aset tetap belum diterapkan.

Tabel 2 Rekapitulasi Komponen Laporan Keuangan BPKAD

	Rekapitulasi Komponen Laporan Redangan Bi Kib				
Komponen Laporan Keuangan	Basis Kas	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual		
	Mencatat transaksi kas	Mencatat transaksi kas	Mencatat transaksi kas		
	dan non kas	dan non kas	saja		
	Menyajikan pos-pos:	Menyajikan pos-pos:	Menyajikan pos-pos:		
Lanoran Paglisasi	 Pendapatan 	 Pendapatan 	 Pendapatan-LRA 		
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	2. Belanja	2. Belanja	2. Belanja		
Aliggaran (LKA)	3. Transfer	3. Transfer	3. Transfer		
	4. Surplus/Defisit	4. Surplus/Defisit	4. Surplus/Defisit-LRA		
	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan		
	6. SiLPA/SiKPA	6. SiLPA/SiKPA	6. SiLPA/SiKPA		
	Menyajikan pos-pos:	Menyajikan pos-pos:	Menyajikan pos-pos:		
	1. Aset	1. Aset	1. Aset		
	Aset Lancar:	Aset Lancar:	Aset lancar:		
	a) Kas dan setara kas	e) Kas dan setara kas	a) Kas dan setara kas		
Neraca	b) Investasi jangka	f) Investasi jangka	b) Investasi jangka		
Neraca	pendek	pendek	pendek		
	c) Piutang pajak dan	g) Piutang pajak dan	c) Piutang (penyisihan		
	bukan pajak	bukan pajak	piutang, Belanja dibayar		
	d) Persediaan	h) Persediaan	dimuka)		
	Aset non lancar:	Aset non lancar:	d) Persediaan		

Komponen Laporan Keuangan	Basis Kas	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual
	a) Investasi jangka panjang b) Aset tetap 2. Kewajiban : a) Kewajiban jangka pendek b) Kewajijban jangka panjang 3. Ekuitas Dana: a) Ekuitas Dana Lancar b) Ekuitas Dana Investasi c) Ekuitas Dana Cadangan	c) Investasi jangka panjang d) Aset tetap 2. Kewajiban : c) Kewajiban jangka pendek d) Kewajijban jangka panjang 3. Ekuitas Dana: d) Ekuitas Dana Lancar e) Ekuitas Dana Investasi f) Ekuitas Dana Cadangan	e) Investasi jangka panjang. Aset tetap 2. Kewajiban jangka pendek (utang belanja, pendapatan diterima dimuka) b) Kewajiban jangka panjang. 3. Ekutas
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	Tidak ada laporan LPSAL	Tidak ada laporan LPSAL	Menyajikan pos-pos: LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos berikut: 1. Saldo Anggaran Lebih tahun lalu 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 3. SiLPA/SiKPA 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 5. Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan
Laporan Operasional (LO)	Tidak ada laporan operasional	Tidak ada laporan operasional	Menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan-LO 2. Beban dari kegiatan operasional 3. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional 4. Pos luar biasa 5. Surplus/Defisit-LO
Laporan Arus Kas (LAK)	Disajikan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan: 1. Aktivitas Operasi 2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 3. Aktivitas Pembiayaan 4. Aktivitas Non Anggaran	Disajikan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan: 5. Aktivitas Operasi 6. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 7. Aktivitas Pembiayaan 8. Aktivitas Non Anggaran	Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan: 1. Aktivitas Operasi 2. Aktivitas Investasi 3. Aktivitas Pendanaan Aktivitas Transitoris
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Tidak ada laporan perubahan ekuitas	Tidak ada laporan perubahan ekuitas	Menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1. Ekuitas Awal 2. Surplus/Defisit-LO 3. Koreksi-koreksi yang langsung

Komponen Laporan Keuangan	Basis Kas	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual
			menambah/mengur angi ekuitas: a. Koreksi nilai persediaan b. Selisih revaluasi aset tetap 4. Ekuitas Akhir
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, Neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan adalah: 1. Pengakuan pendapatan 2. Pengakuan belanja	CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, Neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan adalah: 1. Pengakuan pendapatan 2. Pengakuan belanja	CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan adalah: 1. Pengakuan pendapatan-LRA 2. Pengakuan pendapatan-LO 3. Pengakuan belanja 4. Pengakuan beban

Sumber: BPKAD, Tahun 2018, data diolah

Penyajian Laporan Keuangan BPKAD Sebelum dan Setelah Berbasis Akrual

Laporan keuangan BPKAD mengalami beberapa perubahan komponen dalam penyajian laporan keuangan dari sebelum dan menerapkan akuntansi berbasis akrual dan setelah menerapkan basis akrual. Perubahan komponen tersebut yaitu :

Septariani

Tabel 3 Rekapitulasi Pos-pos dalam Laporan Keuangan BPKAD

Komponen Laporan Keuangan	Basis Kas	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual
Laporan Realisasi Anggaran	Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Langsung Belanja Barang/Jasa Belanja Modal SURPLUS/DEFISIT SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal SURPLUS/DEFISIT SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	Pendapatan-LRA Pendapatan Asli Daerah-LRA Pendapatan Pajak Daerah-LRA Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Lain-Lain PAD yang Sah Belanja Operasi Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya SURPLUS/DEFISIT SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Neraca	Aset Aset Lancar Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan	Aset Aset Lancar Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan	Aset Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas

Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR) Vol. 2 No.1, Desember 2018, 32 – 51

Septariani

Komponen Laporan Keuangan	Basis Kas	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Tidak Ada Laporan	Tidak Ada Lapoaran	Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Subtotal Sisa Anggaran Tahun Berjalan Subtotal Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir
Laporan Operasional	Tidak Ada Laporan	Tidak Ada Laporan	Kegiatan Operasional Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Yang Sah Beban Surplus/Defisit dari Operasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa Surplus/Defisit LO
Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak Ada Laporan	Tidak Ada Laporan	Ekuitas Awal Surplus/defisit-LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap
Laporan Arus Kas		Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar

Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR) Vol. 2 No.1, Desember 2018, 32 – 51

Septariani

Komponen Laporan Keuangan	Basis Kas	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual
		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
		Arus Kas dari Aktivitas Investas Aset Nonkeuangan	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
		Arus Kas Masuk	Arus Kas Masuk
		Arus Kas Keluar	Arus Kas Keluar
		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
			Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
		Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Arus Kas Masuk
		Arus Kas Masuk	Arus Kas Keluar
		Arus Kas Keluar	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	
			Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
		Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Arus Kas Masuk
		Arus Kas Masuk	Arus Kas Keluar
		Arus Kas Keluar	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	
			Kenaikan/Penurunan Kas
		Kenaikan/Penurunan Kas	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara
		Saldo Awal Kas di BUD	Pengeluaran
		Saldo Akhir di BUD	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara
		Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Pengeluaran
		Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
		Saldo Akhir Kas	Saldo Akhir Kas

Sumber: BPKAD, Tahun 2018, Data diolah.

Dampak Penerapan Akuntani Setelah Berbasis Akrual

Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual memiliki banyak dampak dalam pelapooran keuangan BPKAD. Basis akrual menyajikan informasi terkait tentang kas dan informasi tambahan secara menyeluruh. Sedangkan dalam pengelolaan aset non keuangan basis akrual menyediakan informasi mengenai aset. Basis akrual juga menyediakan informasi yang akuntabel dan lebih sederhana untuk menilai instansi dan kreditur.

Penyajian laporan keuangan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin setelah menerapkan Basis Akrual yaitu, komponen laporan keuangannya terdirir dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Perubahan komponen LRA setelah menerapkan basis akrual yaitu pada pos akun pendapatan yang sebelumnya pos pendapatan menyajikan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari transaksi kas dan non keuangan menjadi Pendapatan-LRA yang menyajikan perbandingan Anggaran pendapatan yang ditargetkan dengan Realisasi pendapatan-LRA yang dihasilkan dari transaksi kas.

Akun pos Belanja yang dari sebelumnya akun belanja dibagi menjadi dalam 2 (dua) pos yaitu pos belanja langsung dan belanja tidak langsung, setelah menerapkan basis akrual penuh pos belanja lebih disederhanakan menjadi 1 (satu) pos yaitu pos belanja saja.

2. Neraca

Perubahan komponen Laporan Neraca BPKAD setelah menerapkan basis akrual sepernuhnya yaitu dari pos Ekuitas yang sebelumnya disebut Ekuitas Dana dan terbagi menjadi 3 (tiga) pos yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan, menajadi pos akun Ekuitas saja. Dalam Akun Aset Lancar juga terdapat tambahan pos akun yaitu pos penyisihan piutang dan belanja dibayar dimuka. Sedangkan dalam pos akun Kewajiban Jangka Pendek terdapat tambahan pos akun utang belanja dan pendapatan diterima dimuka.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL dari yang sebelumnya tidak digunakan oleh BPKAD sebagai salah satu komponen laporan keuangan BPKAD setelah menerapkan basis akrual

sepenuhnya LPSAL menjadi salah satu komponen laporan keuangan yang harus disajikan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) dari yang sebelumnya tidak digunakan oleh BPKAD sebagai salah satu komponen laporan keuangan BPKAD setelah menerapkan basis akrual sepenuhnya LO menjadi salah satu komponen laporan keuangan yang harus disajikan. LO mencatat transaksi yang berkaitan dengan non kas, dalam LO menyajikan Pendapatan-LO dan Beban yang dihasilkan dari kegiatan operasional serta surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebelumnya tidak digunakan oleh BPKAD sebagai komponen laporan. Setelah menerapkan basis akrual penuh LPE digunakan sebagai salah satu komponen laporan yang harus di laporkan oleh BPKAD.

6. Laporan Arus Kas

Perubahan Laporan Arus Kas BPKAD setelah menerapkan basis akrual yaitu menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas yang terjadi di BPKAD dalam satu periode pelaporan akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan kas keluar diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK menyajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CALK juga menyajikan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh BPKAD dan Pengungkapan-pengungkapan yang diharuskan untuk diungkapkan dalam CALK.

Selain dari perubahan komponen laporan keuangan dampak dari penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena informasi yang diberikan lebih handal, relevan dan dapat dibandingkan sehingga mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan

dan mempermudah dalam pengambilan keputusan ekonomi serta dapat memprediksi anggaran pada periode berikutnya.

Hal tersebut menunjukan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di BPKAD dapat dikatakan baik daripada sebelum menerapkan basis akrual. Namun masih ada kelemahan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini yaitu, sulitnya mengkonversikan perubahan komponen laporan keuangan yang sebelumnya tidak disajikan dalam laporan keuangan oleh sebagian SKPD di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga sering terjadinya keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada bagian Akuntansi BPKAD. Hal ini disebabkan tidak semua pegawai yang mengelola SIMDA keuangan memiliki latar pendidikan yang sama dan paham dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan tentang Penerapan dan Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

1. Dampak penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu perubahan komponen laporan keuangan yang disajikan lebih rinci mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, juga informasi mengenai aset dan penyesutuan aset tetap sehingga informasi yang diberikan lebih mudah dipahami dan dimengerti, lebih relevan, andal dan dapat dibandingkan sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan ekonomi serta dapat memprediksi anggaran pada periode berikutnya. Namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu sulitnya mengkonversikan perubahan komponen laporan keuangan tersebut sehingga masih sering terjadi keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Saran

- Sebaiknya dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual khususnya BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, perlu adanya upaya ekselerasi sinkronisasi SAP berbasis akrual dengan peraturan lokal di Pemerintahan Daerah.
- 2. Sulitnya mengkonversikan komponen laporan keuangan dengan demikian perlu adanya pengembangan dan pemahaman para pengelola keuangan. Sebaiknya BPKAD mengadakan pelatihan untuk pegawai yang menjadi operator SIMDA keuangan dan mengadakan sosialisasi berupa seminar berkaitan dengan SAP berbasis akrual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Langelo, F., D. P. E. Saerang, dan S.W. Alexander. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA 1* V 3 (1), 1-8. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556. diakses tanggal 10 juli 2018. pukul 14:00 wib.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi, dan Maulidah, Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi, dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlan, Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT INDEKS.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Vol. 2 No.1, Desember 2018, 32 – 51

Septariani

Satrio, M. Dimas., Yuhertiana, Indrawati., Hamzah, Ardi. 2016. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 18, No 1*, 59-70.